

Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II) Periode 2019-2023

Anggi Rostiana Ambarwati^{1*}, Rispanty²

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: anggirostiana402@gmail.com

Diterima: 26-03-2025 | Disetujui: 27-03-2025 | Diterbitkan: 28-03-2025

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the consumption of goods and services within the customs area. VAT contributions are considered important for state revenues because they are the second largest contributor to other types of tax after income tax by providing around 30% of tax revenues. The purpose of this research is to test and analyze the influence of inflation and the rupiah exchange rate on Value Added Tax (VAT) receipts. This research was conducted at the Central Java II Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) in the period January 2019 to December 2023. The population of this research was the inflation rate in Central Java and the rupiah exchange rate against one US dollar based on the selling rate. The data used in this research is monthly data so that 60 observations were obtained. The sampling technique uses a saturated sample technique. Data analysis techniques use descriptive analysis, Classic Assumption Test, Multiple Linear Regression, Hypothesis Testing, and Determinant Coefficient (R²). The research results prove that there is a significant influence of inflation on Value Added Tax (VAT) revenues, while there is no significant influence on the Rupiah Exchange Rate on Value Added Tax (VAT) revenues.

Keywords: Inflation, Rupiah Exchange Rate, Value Added Tax

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan dengan memberikan sekitar 30% dari penerimaan pajak. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II pada periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2023. Populasi penelitian ini adalah tingkat inflasi di Jawa Tengah dan nilai tukar rupiah terhadap satu US dollar berdasarkan kurs jual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan sehingga diperoleh sebanyak 60 pengamatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinan (R²). Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan pada Nilai Tukar Rupiah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Pajak Pertambahan Nilai

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rostiana Ambarwati, A., & Rispanty. (2025). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II) Periode 2019-2023. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3256-3269. <https://doi.org/10.62710/qfb7p030>

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terkait dengan pajak beragam, meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan pajak lainnya. Pada dasarnya, pajak sering akan dipungut setiap kali subjek pajak telah memperoleh sejumlah uang tertentu yang sudah ditetapkan UU yang berkaitan. Apabila dibandingkan pada pajak lainnya, pajak pertambahan nilai merupakan bagian yang signifikan dari penerimaan pajak dalam negeri yang berbeda.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak. PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN. Apabila dibandingkan pada pajak lainnya, pajak pertambahan nilai merupakan bagian yang signifikan dari penerimaan pajak dalam negeri yang berbeda. Pada dasarnya, pajak sering akan dipungut setiap kali subjek pajak telah memperoleh sejumlah uang tertentu yang sudah ditetapkan Undang-Undang yang berkaitan. PPN termasuk jenis pajak yang penting karena jangkauannya lebih luas dari pajak-pajak yang lainnya. Jangkauan PPN meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan hidupnya. (Pratiwi, Rachel. 3 Oktober 2022).

Penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II tahun 2023 tercapai 102,98%. Tentu pencapaian ini tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II dari Kab. Sragen sampai dengan Kab. Cilacap termasuk wajib pajak di Surakarta dan sekitarnya yang luar biasa. (Wartono, Anjar.VARTADIY. SOLO. 15 Juli 2024).

Menindaklanjuti mengenai Penerimaan PPN tahun 2024 ini, Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan Jawa Tengah II hingga akhir Juli 2024 tumbuh sebesar 11,72 persen dibandingkan periode sama tahun 2023. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jateng II Mochamad Taufiq di Solo, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II per 31 Juli 2024 mencapai Rp7,98 triliun atau 53,78 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp14,83 triliun. "Secara rinci, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II per jenis pajak periode Januari-Juli tahun ini, salah satunya dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas sebesar Rp4,61 triliun," katanya. Selain itu, ada pula kontribusi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sebesar Rp3,19 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp34,72 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp142,02 miliar. (Warsita, Aris. ANTARA 2024. 22 Agustus 2024).

Dan menurut data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode tahun 2019-2023 realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengalami peningkatan dan penurunan yang lumayan signifikan. Maka dari itu diperlukan adanya kajian ilmiah mengenai faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPN.

**Tabel I Realisasi Penerimaan Pajak Perambahan Nilai Di Kanwil DJP Jateng II
Tahun 2019-2023**

Tahun	Penerimaan PPN
2019	4.243.051.458.155
2020	3.828.087.827.064
2021	4.085.566.179.493
2022	7.996.067.781.616
2023	4.957.638.984.220

Sumber: Data dari Kanwil DJP Jateng II, 2024

Tabel diatas merupakan informasi realisasi Penerimaan PPN pada 5 tahun berturut-turut pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang semula Rp 4,2 triliun turun menjadi Rp 3,8 triliun. Lalu pada tahun 2023 juga mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun 2022.

Sejalan dengan Wijayanti dalam (Sinambela & Rahmawati, 2019) mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi utama masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia merupakan kegiatan konsumsi yang memiliki hubungan erat dengan Penerimaan PPN. Diyakini semakin bertambah kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat maka akan semakin meningkat pula penerimaan negara dari sektor PPN dan sebaliknya. Ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.

Indikator ekonomi makro yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Tingkat inflasi suatu negara berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur perubahan dan dikatakan ada jika kenaikan harga terjadi secara konsisten dan berdampak satu sama lain. Inflasi juga merujuk pada kenaikan jumlah uang beredar, yang juga disalahkan atas kenaikan harga. Terdapat metode yang paling sering dimanfaatkan dalam memprediksi tingkat inflasi ialah *CPI* dan *GDP Deflator*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak akan lebih baik karena penurunan inflasi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan rumah tangga. Penurunan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penurunan inflasi akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan Penerimaan PPN.

Indikator ekonomi makro yang kedua adalah nilai tukar rupiah. Menurut *FASB (Financial Accounting Standard Board)* “Suatu nilai tukar adalah rasio antara satu unit mata uang dan sejumlah mata uang lain yang bisa dipertukarkan pada waktu tertentu”. Nilai tukar rupiah juga biasa disebut dengan kurs. Nilai tukar rupiah merupakan nilai mata uang asing (luar negeri) terhadap suatu nilai mata uang domestik. Nilai tukar mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah melemah maka akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat meningkat yang kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, karena ini adalah pajak atas konsumsi. Jika terjadi kenaikan nilai tukar (melemah terhadap dollar), maka akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa mengalami kenaikan harga, tingkat perubahan harga tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen yang menurun dan akan

berlanjut terhadap Penerimaan PPN dalam negeri.

Penelitian dengan tema Penerimaan PPN telah banyak dilakukan Sapridawati, Indrawati, Sofyan, Zirman (2021) meneliti Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dengan amatan tahun 2015-2019. Penelitian dengan tema yang sama juga dilakukan oleh Wijaya dan Asy'ari (2023) dengan populasi yang dipublikasikan pada periode 2017-2021. Tongam Sinambela, Suci Rahmawati (2019) meneliti Penerimaan PPN pada Kantor Pusat DJP Jakarta dengan populasi yang berjumlah 60 pengamatan tahun 2013-2017, dan Juniarto, Harimurti, Suharno (2020) meneliti faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap Penerimaan PPN. Penelitian Fatunnisa dan Wibowo (2020) tentang yang menjadi pengaruh penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pemeriksaan Pajak wilayah DJP Jateng II.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah inflasi. Hal ini disampaikan oleh Sapridawati, Indrawati, Sofyan, Zirman (2021) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Pada penelitian yang dilakukan Wijaya, Asy'ari (2022) terbukti bahwa inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Namun, pada penelitian yang dilakukan Sinambela, Rahmawati (2019) membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hasil yang sama ditemukan oleh Junianto, Harimurti, Suharno (2020) bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Jika terjadi kenaikan nilai tukar (melemah terhadap dollar), maka akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa mengalami kenaikan harga, tingkat perubahan harga tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen yang menurun dan akan berlanjut terhadap Penerimaan PPN dalam negeri, selain itu dengan adanya peningkatan nilai tukar mengakibatkan biaya produk untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat pula dan akan meningkatkan harga jual akhir, maka daya beli konsumen akan menurun dan berakibat pada menurunnya Penerimaan PPN. Hal itu dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Sapridawati, Indrawati, Sofyan, Zirman (2021) bahwa nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Sama halnya dengan penelitian oleh Junianto, Harimurti, Suharno (2020) ditemukan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan PPN. Ini berbedadengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela, Rahmawati (2019) dan Fatunnisa, Wibowo (2022) bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Penelitian tentang penerimaan pajak pertambahan nilai ini akan dikaji dengan teori paritas daya beli. Teori ini dipublikasikan oleh Gustav Cassel (1918). Teori ini menjelaskan nilai tukar menyesuaikan dari masa ke masa dalam menggambarkan selisih inflasi antara dua Negara yang akan mempengaruhi daya belimasyarakat dalam memakai produk dalam negeri. Teori ini juga menunjukkan adanya konflik stabilisasi harga domestik terhadap stabilisasi nilai tukar (Madura dalam Kartikaningtyas dkk,2014:3).

Mengacu pada uraian di atas serta beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat faktor-faktor penentu Penerimaan PPN, dua diantaranya ialah inflasi dan nilai tukar rupiah. Akan tetapi hasilnya masih bertentangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang Penerimaan PPN melalui kedua faktor diatas.

Alasan ingin meneliti mengenai Penerimaan PPN karena, dari sekian banyak sumber penerimaan negara yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa

variabel yang telah dijelaskan sebelumnya diatas dengan judul penelitian “PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) STUDI PADA KANTOR WILAYAH DJP JATENG II PERIODE 2019-2023”

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jederal Pajak Jawa Tengah II pada periode tahun 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, sedangkan variabel dependennya adalah Penerimaan PPN.

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi adalah tingkat inflasi di Jawa Tengah dan nilai tukar rupiah terhadap satu US dollar berdasarkan kurs jual di website BI. Sampel dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar per bulan di wilayah Jawa Tengah dengan data penelitian berupa time series dalam kurun waktu Januari 2019 - Desember 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 60 bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mencakup strategi pengumpulan data, yang secara khusus bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi, relevan, dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada catatan yang telah tersedia di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) serta catatan pada Kantor Wilayah DJP Jateng II.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi sesuatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, ranger, kartosis, dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis statistik dalam penelitian ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai variabel tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan PPN. Metode analisis ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Menurut Sugiyono (2010:261) persamaan matematis untuk hubungan yang di hipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penerimaan PPN

- α : Konstanta
 β_{12} : Koefisien Regresi
 X_1 : Inflasi
 X_2 : Nilai Tukar Rupiah
 e : Error

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II merupakan salah satu unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ini beralamatkan di Jl. MT Haryono No.5, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang merupakan pejabat eselon II. Kantor Wilayah DJP II membawahi 12 KPP dan 6 KP2KP yang berada di 17 Kabupaten/Kota mulai dari Sragen hingga Cilacap.

Hasil Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan suatu data yang dilihat dari mean (nilai rata-rata), minimum, maksimum, standar deviasi dari variabel-variabel yang di uji dalam penelitian ini dengan 60 sampel pengamatan. Data yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), situs Bank Indonesia dan data pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II tahun 2019-2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
INFLASI	60	3,00	595,00	276,3833	142,26748
NILAI TUKAR	60	13,80	15,95	14,6944	,54160
PPN	60	66,93	317,25	124,8750	66,56269
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

a. Analisis Deskriptif Variabel Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi juga ialah keadaan suatu negara ketika terjadinya nilai mata uang domestik mengalami penurunan yang

disebabkan jumlah uang beredar banyak. Inflasi dapat mempengaruhi harga barang ataupun jasa secara komprehensif pada masa tertentu. Variabel inflasi diukur dengan melihat data tingkat inflasi perbulan di wilayah Jawa Tengah selama Januari 2019- Desember 2023. Data inflasi yang di teliti menunjukkan nilai minimum sebesar 3,00%, nilai maximum sebesar 595,00%, dan mean sebesar 276,3833% dengan standar deviasi 142,26748%. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa terdapat indikasi inflasi berat (tinggi) dalam kurun tahun 2019-2023. Jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, secara otomatis akan meningkatkan harga jual, yang menjadi dasar pengenaan pajak PPN/Penerimaan PPN akan semakin bertambah.

b. Analisis Deskriptif Variabel Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi nilai tukar rupiah merupakan nilai satu mata rupiah yang dikonstasikan ke dalam mata uang negara lain. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Data nilai tukar rupiah yang diteliti menunjukkan nilai minimum sebesar 13,80%, nilai maximum sebesar 15,95% dan mean sebesar 14,6944% dengan standar deviasi 0,54160%. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN berada pada kisaran rata-rata 14,6944% yang lebih kecil dari nilai maximum 15,95%, penerimaan PPN dalam rupiah mungkin lebih rendah karena nominal PPN yang diterima dalam bentuk rupiah akan lebih sedikit.

c. Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu di daerah pabean oleh pengusaha tertentu. PPN ialah pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang /jasa dalam sebuah proses transaksi. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diukur dengan jumlah rupiah realisasi penerimaan PPN di Kantor Wilayah DJP Jateng II setiap bulannya untuk periode tahun 2019 hingga 2023. Data yang diteliti menunjukkan nilai minimum 66,93%, nilai maximum sebesar 317,25 dan nilai mean sebesar 124,8750% dengan standar deviasi 66,56269%. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jateng II dalam kurun waktu 2019-2023 semakin meningkat namun masih jauh dari nilai maximum penerimaan PPN.

Analisis Induktif

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Inflasi (X1) dan Nilai Tukar Rupiah (X2) pada Penerimaan PPN (Y) di Kanwil Jateng II periode tahun 2019-2023. Rumus analisis regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Penerimaan PPN
X1	= Inflasi
X2	= Nilai Tukar Rupiah
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ ,	= Koefisien Regresi

$$e = \text{Error}$$

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-184,698	222,334		-,831	,410
INFLASI	,206	,059	,440	3,470	,001
NILAI TUKAR	17,194	15,592	,140	1,103	,275

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

Analisis regresi linear berganda diperoleh Persamaan Regresi

$$Y = -184,698 + 0,206 X_1 + 17,194 X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah:

- a = Nilai konstanta sebesar -184,698 yang merupakan dengan pengaruh negatif, artinya menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas dalam penelitian ini. Jika Inflasi (X_1) = 0, Nilai Tukar Rupiah (X_2) = 0 maka Penerimaan PPN (Y) sebesar -184,698 atau tidak mengalami perubahan.
- b1 = 0,206. Artinya: jika inflasi meningkat sebesar 1% maka Penerimaan PPN (Y) akan meningkat sebesar 0,206% dengan asumsi variabel X_2 (Nilai Tukar Rupiah) konstan / tetap.
- b2 = 17,194. Artinya: jika nilai tukar rupiah meningkat sebesar 1% maka Penerimaan PPN (Y) akan meningkat sebesar 17,194% dengan asumsi X_1 (Inflasi) konstan / tetap.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t dimaksudkan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Ditentukan α (level of signifikansi) = 0,05 (5%).

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

a). Formulasi Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y

$H_a : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y.

b). Kriteria:

H_0 diterima bila $p\text{-value}$ (signifikansi) > 0,05.

H_0 ditolak bila $p\text{-value}$ (signifikansi) < 0,05.

Tabel 3 Hasil Uji T

Coefficients^a

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	-184,698	222,334		-,831	,410
	INFLASI	,206	,059	,440	3,470	,001
	NILAI TUKAR	17,194	15,592	,140	1,103	,275

a. *Dependent Variable: PPN*

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

- Uji – t variabel X1 (Inflasi)
Diperoleh nilai p-value (sig) = 0,01 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh signifikan Inflasi terhadap Penerimaan PPN.
Kesimpulan: H1 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jateng II terbukti kebenarannya.
- Uji – t variabel X2 (Nilai Tukar Rupiah)
Diperoleh nilai p-value (sig) = 0,275 > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan PPN.
Kesimpulan: H2 yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Direktorat Jendral Pajak Jateng II tidak terbukti kebenarannya.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi pengaruh inflasi (X1) dan Nilai Tukar Rupiah (X2) secara simultan terhadap Penerimaan PPN (Y).

- Formulasi Hipotesis:
H0 : $\beta_1=\beta_2=0$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Inflasi (X1), dan Nilai Tukar Rupiah (X2) secara simultan terhadap Penerimaan PPN (Y).
Ha : $\beta_1\neq\beta_2\neq 0$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan Inflasi (X1) dan Nilai Tukar Rupiah (X2) secara simultan terhadap Penerimaan PPN (Y).
- Kriteria:
Ho diterima bila p-value (signifikansi) > 0,05
Ho ditolak bila p-value (signifikansi) < 0,05

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA^a

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	70272,608	2	35136,304	10,478	,000 ^b
	Residual	191132,319	57	3353,199		
	Total	261404,927	59			

a. *Dependent Variable: PPN*

b. *Predictors: (Constant), NILAI TUKAR, INFLASI*

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

Hasil perhitungan label ANOVA^a menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 10,478 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan X_1 (Inflasi) dan X_2 (Nilai Tukar Rupiah) secara bersama-sama secara simultan terhadap Y (Penerimaan PPN).

d. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara komprehensif. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel independen.

Hasil dari uji koefisien korelasi dan determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,518 ^a	,269	,243	57,90681

a. *Predictors: (Constant), NILAI TUKAR, INFLASI*

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y). Hasil uji dapat dilihat dari tabel di atas.

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,243. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen X_1 (Inflasi) dan x_2 (Nilai Tukar Rupiah) terhadap Y (penerimaan PPN) sebesar 24,3% sisanya ($100\% - 24,3\%$) = 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji t-hitung sebesar 3,470 dengan p-value sebesar $0,01 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II periode Januari 2019 sampai Desember 2023. Sehingga Hipotesis yang menyatakan bahwa “Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II periode Januari 2019 - Desember 2023 terbukti kebenarannya”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang signifikan pada tingkat Inflasi yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai rata-rata sebesar 276,3833% menunjukkan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa secara signifikan. Meskipun Penerimaan PPN dalam nominal rupiah bisa meningkat, daya beli masyarakat akan menurun, yang dapat mengurangi konsumsi. Penerimaan PPN dalam rupiah bisa lebih tinggi karena PPN dihitung berdasarkan nilai transaksi. Namun, peningkatan ini tidak selalu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena inflasi yang sangat tinggi

sering kali mencerminkan ketidakseimbangan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat mengarah pada peningkatan beban PPN bagi konsumen, karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi, meskipun penerimaan PPN dalam jumlah nominal mungkin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sapridawati, Indrawati, Sofyan, Zirman (2021) dan Wijaya, Asy'ari (2022) dalam penelitiannya terbukti bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sinambela, Rahmawati (2019) dan Juniarto, Harimurti, Suharno (2020) yang menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji t-hitung sebesar 1,103 dengan p-value sebesar $0,275 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II periode januari 2019 – desember 2024. Sehingga Hipotesis yang menyatakan bahwa “Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II periode januari 2019 – desember 2024 tidak terbukti kebenarannya”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN berada pada kisaran rata-rata yang relatif lebih rendah daripada nilai maksimum. Apabila terjadi kenaikan nilai tukar rupiah maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun, selain itu kenaikan nilai tukar juga akan berakibat pada kenaikan biaya produksi sehingga harga produk barang dan jasa juga akan meningkat dan daya beli masyarakat menurun dan penurunan penerimaan PPN. Jika nilai rata-rata 14,6944% lebih kecil daripada nilai maksimum 15,95%, maka penerimaan PPN dalam bentuk rupiah cenderung lebih rendah, yang bisa memengaruhi pendapatan negara. Hal ini membuat ekspor suatu negara menjadi lebih murah dan impornya menjadi lebih mahal. Akibatnya, permintaan terhadap ekspor suatu negara biasanya akan meningkat sementara permintaan terhadap impornya akan menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sapridawati, Indrawati, Sofyan, Zirman (2021) dan Juniarto, Harimurti, Suharno (2020) yang menyatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan sejalan dengan penelitian Sinambela, Rahmawati (2019) dan Fatunisa, Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II) Periode 2019-2023
(Rostiana Ambarwati, et al.)

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jateng II periode 2019-2023. Artinya, semakin besar tingkat inflasi dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa secara signifikan. Meskipun Penerimaan PPN dalam nominal rupiah bisa meningkat, daya beli masyarakat akan menurun, yang dapat mengurangi konsumsi.
2. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jateng II periode 2019-2023. Artinya, nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Jika terjadi kenaikan nilai tukar rupiah maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun, selain itu kenaikan nilai tukar juga akan berakibat pada kenaikan biaya produksi sehingga harga produk barang dan jasa juga akan meningkat dan daya beli masyarakat menurun dan penurunan penerimaan PPN.

KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus di Kanwil DJP Jateng II dan pada kurun waktu 5 tahun.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kanwil DJP Jateng II.
3. Nilai signifikansi dari Uji-t variabel X2 adalah $1,103 > 0,05$, yang dimana artinya ialah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengerucutkan lagi objek penelitian mengenai Penerimaan PPN misalnya melakukan penelitian pada salah satu dari 12 KPP yang berada pada naungan Kanwil DJP Jateng II.
2. Diharapkan juga dapat melakukan pengujian kembali dengan periode waktu yang berbeda dan dengan menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Penerimaan PPN seperti surat tagihan pajak, restitusi ppn, jumlah pengusaha kena pajak, tingkat suku bunga, self assesment system, produk domestik bruto, dan lain-lain yang dapat menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Periode 2005-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.1, No.2 April 2023
- Asiah, N., Yahya, A., & Fuadi, A. (2023). Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang

- Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(02), 89-98.
- Fatunnisa, R., Wibowo, B. (2022). Pengaruh Jumlah PKP, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahu 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.11 No.3 November 2022.
- Ivon, I. A., Trisnayanti, Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana I3.1 (2015): 292-310*.
- Junianto, S., Harimurti, F., Suharno (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah DJP Jateng II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.16 Edisi Khusus Juni*.
- Khairani, S., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 431-443.
- Mahendra, A., Pramita, E. H., Jannah, S. R., Zahara, D., & Gulo, S. R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 336-347.
- Maulida, C. I., Adnan (2017). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2, No.4, (2017) E-ISSN 2581-1002*.
- Pratiwi, L. G., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024, February). Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 4, No. 1, pp. 242-249). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Vol.2, No1, 2021 hal.1-21. ISSN: 22722-5313 (p), 2722-5437 (e).
- Pratiwi, S. A., Suryani, E. (2018). Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi PPN Terhadap Pennerimaan PPN (KPP Pratama Cibinong 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 4 No.2, September 2018*
- Rahmadani, N., & Oktavia, V. Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Ekspor Sebagai Variabel Mediasi.
- Renata, A. H., Hidayat, K., Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Perpajakan(JEJAK) Vol.9 No.1 2016*.
- Rustian, N. R., & Kusumastuti, S. Y. (2023). PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA TAHUN 2008-2022. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 585-595.
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN. Vol.2, No.1, 2021 hal.1-21. ISSN: 22722-5313 (p) ,2722-5437 (e).
- Sinambela, T., Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Iinflasi, Nilai Tukar RupiahDan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.5No.1 April 2019*.
- Wijaya, J. H., Asy'ari, N. M. (2022). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan PPN Periode 2017- 2021. *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol.16, No.2, Desember 2022, 105_114.
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 19(1), 66-84.